

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Terciptanya masalah kepentingan yang biasa diketahui sebagai teori keagenan atau *agency theory* terjadi karena pemilik perusahaan memberikan mandate kepada manajer untuk membuat keputusan penting pada perusahaan. Ketika pemilik atau pemegang saham yang dikenal dengan prinsipal kemudian individu atau organisasi lain disewanya yang kemudian bisa dikenal sebagai manajer atau agen, disewa dengan maksud melaksanakan pekerjaan jasa dan menyerahkan wewenang pada manajer atau agen itu untuk membuat suatu keputusan, hal tersebut yang terjadi pada hubungan keagenan atau (*agency relationship*). Tujuan dari teori keagenan ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait dengan perbedaan tujuan pemegang saham atau prinsipal dan manajer atau agen, baik masalah pembagian risiko saat prinsipal dan manajer terjadi perbedaan perilaku terhadap menanggapi suatu risiko, maupun kurangnya prinsipal dalam melakukan verifikasi pekerjaan manajer.¹

Manajer atau bisa disebut dengan agen oleh investor atau bisa disebut sebagai prinsipal sebagai orang yang mewakili adanya kepemilikan dari perusahaan memberikan amanah kepada manajer untuk mengelola kekayaan atau harta dari investor atau pemegang saham. Upaya itu dilaksanakan investor dengan harapan adanya penyerahan kewenangan tersebut, manajer atau agen dapat mengelola kekayaan atau harta investor dengan

¹ Reny Dyah Retno dan Denies Priantinah, “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)”, *Jurnal Nominal* 1, No. 1, (2012): 86.

semaksimal mungkin, sehingga investor akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan atau hartanya dan kemakmurannya.²

Ketika ada bagian berkaitan memiliki tujuan yang berbeda maka akan menimbulkan adanya masalah pada hubungan keagenan tersebut. Pemegang saham atau investor menginginkan kekayaannya bertambah dan kemakmuran, sedangkan manajer atau agen menginginkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran pula. Sehingga terjadilah masalah keagenan antara investor atau prinsipal dengan manajer atau agen. Investor atau prinsipal lebih menghendaki untuk memaksimalkan pengembalian dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer atau agen memiliki kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan upahnya.³

Sehingga masalah dari teori keagenan tersebut diasumsikan akan hilang apabila kepemilikan manajerial diterapkan dalam perusahaan yaitu seorang manajer sekaligus pemilik, atau pemegang saham sekaligus pengelola perusahaan. Jika kepemilikan manajerial rendah, sehingga akan meningkatkan dorongan pada manajer untuk melakukan perilaku oportunistik (mengambil kesempatan menguntungkan). Kemudian dengan diterapkannya *Good corporate governance* mengenai dewan komisaris independen, akan sangat berimbas pada perusahaan. Yaitu dewan komisaris independen akan mengawasi dan mengarahkan dewan direksi dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kegiatan usahanya pada perusahaan serta memberikan nasehat

² Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, No. 2, (2012): 122.

³ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*": 122.

jika diperlukan. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, juga bertindak seluruhnya demi kebaikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Kualitas laporan yang disajikan juga merupakan tanggungjawab dewan komisaris.⁴

b. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) dalam buku Muh. Arief Effendi, *corporate governance* merupakan serangkaian aturan di dalamnya terdapat aturan mengenai hubungan pemegang saham atau investor, pengelola atau pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan serta pihak-pihak pemangku keperluan internal maupun eksternal lain-lain bersangkutan mengenai hak-hak serta kewajibannya atau biasa dijelaskan sebagai sistem pengendali pada perusahaan.⁵

Good corporate governance merupakan suatu rangkaian kegiatan, kebiasaan, aturan, kebijakan dan lembaga yang berpengaruh terhadap pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan pada perusahaan. *Good corporate governance* di dalamnya terdapat hubungan diantara *stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang terlibat yaitu pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi sebagai pihak utama yang terlibat serta tujuan dari pengelolaan perusahaan. *Corporate governance* mempunyai banyak aspek di dalamnya, salah satu topik utamanya adalah hal yang menyangkut akuntabilitas dan tanggungjawab, khususnya dalam memastikan adanya etika yang baik dan melindungi kepentingan investornya dalam penerapan mekanisme dan pedoman dari GCG.⁶

⁴ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, “Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*” : 121.

⁵ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 3.

⁶ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, “Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*”: 120.

Tata kelola perusahaan secara garis besar adalah sistem dari perusahaan bagaimana cara mengelola perusahaannya. Kemudian dalam penelitian ini diprosikan menjadi kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris independen, yang mana kedua proksi tersebut digunakan peneliti dalam mengukur *good corporate governance* itu sendiri. Sehingga apabila didapatkan hasil dari kedua proksi tersebut sama halnya hasil dari *good corporate governance* karena proksi tersebut termasuk bagian dari penjabaran *corporate governance*.

c. Tujuan Good Corporate Governance

Implementasi dari diterapkannya *good corporate governance* yang baik secara konkrit mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan *cost of capital* (biaya modal atau biaya nyata dipergunakan dalam mendanai investasi) yang lebih murah
- 2) Memudahkan jalan masuk investor terhadap investasi dalam negeri maupun luar negeri yang akan ditanamkan di perusahaan
- 3) Mempunyai pertimbangan yang matang sehingga dapat memutuskan suatu keputusan terbaik dalam upaya memaksimalkan kinerja ekonomi pada perusahaan
- 4) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada perusahaan oleh para pemangku kepentingan
- 5) Melindungi dewan komisaris dan dewan direksi dari tuntutan hukum.⁷

d. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Adapun prinsip-prinsip yang dijalankan saat dilakukannya penerapan *good corporate governance* yaitu:

1) Prinsip Transparansi

Transparansi mempunyai arti terbuka atau transparan tidak ada yang ditutupi, yang dimaksudkan di sini terbuka akan adanya suatu

⁷ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 8.

informasi, ketepatan waktu, kejelasan dan dapat diperbandingkan terkait keadaan keuangan, manajemen perusahaan, kinerja operasional serta kepemilikan perusahaan.⁸

Transparansi juga bisa diartikan keterbukaan suatu perusahaan dalam menjalankan mekanismedalam mengambil keputusan dan terbuka saat mengemukakan suatu informasi yang bersifat materiil dan penting terhadap perusahaan.⁹

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengatur tugas dan kewajiban manajemen pada saat mengelola perusahaan agar bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan serta membantu usaha dalam menjamin adanya keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dengan diawasi oleh dewan komisaris. Dalam hal tersebut mengawasi manajemen dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang telah diputuskan oleh pemegang saham, independensi dari prinsip ini harus dijaga agar terlaksana sesuai dengan tujuan (efektif) adalah tugas dari dewan komisaris.

Para pemegang saham harus menyadari tanggungjawabnya sebagai pemegang saham untuk menggunakan haknya secara bijak. Oleh karena itu, dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan pertimbangan yang objektif mengenai independensi perusahaan yang harus dijaga, khususnya terhadap manajemen. Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam perusahaan sebagai upaya menangani masalah yang terjadi karena pembagian tugas antar-organ dalam

⁸ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 11.

⁹ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*": 121.

perusahaan serta meminimalkan dampak dari masalah keagenan yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Pembagian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan bisa menjadi jelas, jika sebelumnya perusahaan memberikan pengertian fungsi, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian tersebut serta mengkomunikasikannya agar masing-masing bagian berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Perusahaan hendaknya menjelaskan tupoksi dari masing-masing organ perusahaan serta mengomunikasikannya kepada pihak berkepentingan agar jelas pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan tersebut. Terdapat tiga tingkatan akuntabilitas yaitu, akuntabilitas individu (hubungan antara atasan dan bawahan), akuntabilitas tim (akuntabilitas yang ditanggung kelompok kerja atas kinerja yang dicapai) dan akuntabilitas korporasi (akuntabilitas perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya sebagai entitas bisnis).¹⁰

3) Prinsip Responsibilitas

Perusahaan dalam mengelola perusahaannya harus dipastikan menaati peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan perusahaan dengan penuh tanggungjawab dan menjadi perusahaan yang baik. Perusahaan selalu mengusahakan adanya hubungan mitra yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam batasan peraturan perundang-undangan dan perilaku dalam menjalankan bisnis yang sehat.

4) Prinsip Independensi

¹⁰ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 13.

Perusahaan percaya bahwa perusahaan yang mandiri akan bisa menjalankan tugasnya serta dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Masing-masing bagian dari perusahaan akan menjalankan tupoksinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan. Selain dari masing-masing bagian dari perusahaan, tidak diperbolehkan ada yang mencampuri manajemen dalam mengelola perusahaan.¹¹

Prinsip independensi juga bisa dikatakan sebagai prinsip kemandirian, yaitu prinsip yang mengharuskan pengelolaan perusahaan secara profesional dengan tidak berbenturan kepentingan dengan pihak manapun dan dipengaruhi oleh pihak manapun yang tidak berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedang berlaku serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹²

5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mempunyai arti bahwa manajemen harus memperlakukan pemegang saham dengan perlakuan yang sama, termasuk kepada investor luar maupun pemegang saham yang tidak dominan atau kecil. Semua pemegang saham diperlakukan sama walaupun dengan kelas yang berbeda, sesuai ketentuan berikut: memiliki hak suara yang sama di kelas manapun oleh semua pemegang saham, para kustodian (penitipan harta) menyampaikan suaranya yang sudah disetujui oleh pemilik saham, proses dan prosedurrapat umum pemegang saham (RUPS) harus memperlakukan pemegang saham dengan

¹¹ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 14.

¹² Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*": 121.

perlakuan sama, pelarangan transaksi orang dalam dan penyalahgunaan wewenang, serta keharusan pengungkapan kepentingan yang bersifat hutang mengenai transaksi atau hak-hak yang berdampak pada perusahaan oleh anggota dewan komisaris dan direksi serta manajer.¹³

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi atau jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola perusahaan yang berperan aktif dalam pembuatan keputusan yaitu para direktur dan komisaris.¹⁴

Menurut teori keagenan atau *agency teory*, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang terpisah bisa mengakibatkan masalah keagenan. Masalah tersebut diakibatkan karena pemegang saham dan agen atau manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing dan kepentingan antara pemegang saham dan manajer bertentangan satu sama lain. Kepentingan yang berbeda antara pemegang saham dan manajer menyebabkan pihak manajemen melakukan kecurangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. Maka dari itu, suatu cara pengendalian perlu dilakukan untuk menyamakan perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut agar agen atau manajer dapat termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.¹⁵

Masalah *agency* diperkirakan akan hilang jika seorang manajer merangkap sebagai pemilik, atau pemegang saham merangkap sebagai pengelola. Ketika

¹³ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 11-15.

¹⁴ Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar, "Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI", *Jurnal EMBA* 3, No. 1, (2015): 1143.

¹⁵ Laurensia Chintia Dewi dan Yeterina Widi Nugrahanti, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2011-2013)", *Jurnal KINERJA* 18, No. 1, (2014): 67-68.

kepemilikan manajemen sedikit, maka dorongan terjadinya kemungkinan perilaku opportunistik (mengambil kesempatan menguntungkan) yang dilakukan manajer akan lebih tinggi. Kebijakan Direksi dan hal umum yang bersangkutan mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya akan diawasi oleh Dewan Komisaris dan diberikan pengarahannya mengenai hal tersebut, serta menasihati Dewan Direksi jika dibutuhkan. Anggota Dewan Komisaris saat melaksanakan tanggungjawabnya, bertindak seluruhnya untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Kualitas laporan yang disajikan juga merupakan tanggungjawab dewan komisaris.¹⁶

Dewan Direksi saat menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memenuhi target dan tujuan harus bertanggung jawab penuh. Setiap anggota dari Dewan Direksi saat melaksanakan kewajibannya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau selaras dengan kode etik usaha wajib beritikad baik dan tanggung jawab penuh. Kebijakan dari perusahaan bahwasanya semua karyawan dan direksi dalam bekerja hendaknya selaras dengan standar perilaku yang tinggi sehingga dapat menjalankan kepentingan yang paling baik untuk perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas yang masuk jadi bagiannya merupakan kode etik usaha.¹⁷

Kinerja manajer akan tercipta secara optimal jika kepemilikan manajerial perusahaan mengalami peningkatan dan hal tersebut akan mendorong manajer agar bekerja dengan hati-hati, karena mereka juga merasakan konsekuensi terhadap tindakannya. Sehingga, kepemilikan manajerial ada pada suatu perusahaan

¹⁶ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*" : 121.

¹⁷ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*" : 122.

memicu adanya dugaan akan menambah nilai bagi perusahaan.

Kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:¹⁸

<p>Kepemilikan Manajerial</p> $= \frac{\text{Kepemilikan saham manajer, direktur, komisaris}}{\text{Total jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$

3. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dasar hukum komisaris independen, berdasarkan Peraturan BEI (d/h BEJ) No. I.A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas. Persyaratan pencatatan diantaranya yaitu: "III.1.4 Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat."¹⁹

Dewan Komisaris terbagi menjadi dua, yaitu dewan komisaris utusan dan dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan semua komisaris dari pihak luar perusahaan dan tidak mempunyai kepentingan bisnis dalam perusahaan yang bersifat substansial. Dewan komisaris independen dapat diukur dari prosentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan dewan komisaris pada perusahaan.²⁰

Komisaris Independen melalui komite audit seharusnya dapat bertugas secara efektif untuk melaksanakan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi

¹⁸ Mariatun, dkk, "Kinerja Keuangan, *Corporate Social Responsibility*, Nilai Perusahaan dan *Good Corporate Governance*", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 17, (2017): 122.

¹⁹ PT Bursa Efek Indonesia, 9 Desember, 2019, <https://www.idx.co.id/peraturan/surat-edaran/>

²⁰ Wardoyo dan Theodora Martina Veronic, "Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* & Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Dinamika Manajemen* 4, No. 2, (2013): 136.

pada perusahaan publik melakukan penyimpangan ataupun kecurangan, karena ketua audit biasanya berasal dari komisaris independen. Langkah-langkah pencegahan kecurangan maupun usulan perbaikan sistem dapat diambil alih oleh komisaris independen, namun tetap dalam lingkup tupoksi komisaris independen. Komisaris independen sudah bertindak efektif pada peran tersebut dalam melindungi perusahaan publik dari risiko juga melindungi dari adanya peluang tuntutan hukum karena kegagalan komisaris independen dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun kunci sukses yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diemban komisaris independen adalah kemampuan komisaris independen dalam menguatkan komite audit yang dipimpinnya.²¹

Adapun rumus dari independensi dewan komisaris sebagai berikut:²²

$$\text{Independensi Dewan Komisaris} = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

4. *Corporate Social Responsibility*

a. *Landasan Teoritis Corporate Social Responsibility*

1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Gray et. al dalam buku Nor Hadi berpendapat bahwa legitimasi merupakan “...*a systems-oriented view of organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, indivisuals and group*”.

Pengertian itu menjelaskan bahwa legitimasi adalah caramengelola perusahaan yang bertujuan pada sejauh mana perusahaan berpihak pada masyarakat atau *society*, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu,

²¹ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, 38.

²² Wardoyo dan Theodora Martina Veronic, “Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”:133.

sebagai suatu sistem dalam perusahaan yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat atau *society*, beroperasinya perusahaan harus sejalan bersama harapan yang diinginkan masyarakat. Teori legitimasi dilihat sebagai *perspective orientation system*, merupakan sistem yang bisa membuat perusahaan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi komunitas di mana perusahaan melaksanakan kegiatan operasinya agar keberlangsungan perusahaan dapat tercapai.²³

2. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Perusahaan bukan hanya bertanggungjawab kepada para pemilik atau *shareholder* namun juga kepada sosial kemasyarakatan atau *stakeholder*. Tanggungjawab perusahaan yang awalnya hanya sisi ekonomi pada laporan keuangan, sekarang harus memperhatikan tanggungjawab pada sisi sosial kepada *stakeholder* internal juga eksternal. *Stakeholder* terdiri dari semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang baik bersifat dipengaruhi juga mempengaruhi, bersifat langsung dan tidak langsung kepada perusahaan. Meliputi: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja karyawan, kaum minoritas dan sebagainya yang keadaannya mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan.

Hakikat dari teori *stakeholder* dikaitkan hubungannya dengan teori legitimasi, ditunjukkan bahwa perusahaan seharusnya meminimalkan perbedaan harapan (*expectation gap*) dengan masyarakat (publik) untuk mendapatkan pengakuan (legitimasi) dari

²³ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011), 88.

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya menjaga reputasi perusahaannya dengan memperhatikan faktor sosial dari *stakeholder* tidak hanya memperhatikan faktor ekonomi dari pemilik atau pemegang sahamnya saja hal itu sebagai bentuk pedulinya perusahaan serta keberpihakannya mengenai masalah sosial masyarakat dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat.²⁴

3. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Kontrak sosial berawal dari adanya hubungan antara satu sama lain supaya terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan adalah kelompok orang yang memiliki tujuan sama serta berusaha menggapai tujuan tersebut bersama-sama, merupakan bagian dari masyarakat pada lingkungan yang lebih besar. Kehadirannya, ditentukan oleh masyarakat yang mana keduanya sama-sama saling berpengaruh. Oleh karena itu, supaya terciptanya keseimbangan dibutuhkan kontrak sosial yang baik secara jelas maupun yang tersirat kemudian dapat menghasilkan kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.²⁵

4. Teori Persinyalan (*Signalling Theory*)

Teori sinyal, membahas tentang adanya dorongan perusahaan agar memberikan informasi pada pihak luar dari perusahaan. Adanya dorongan itu dikarenakan terjadi ketidaksepadan informasi pihak manajemen dan pihak luar, dalam rangka meminimalkan ketidakseimbangan informasi itu, sehingga perusahaan seharusnya terbuka dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaannya kepada pihak eksternal yang bersangkutan baik masalah keuangan atau non-keuangan. Termasuk pengungkapan

²⁴ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 93-95.

²⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 95.

informasi mengenai tanggungjawab dari perusahaan dalam laporan tahunan, dengan harapan bisa menaikkan citra perusahaan di pihak eksternal dan bisa menaikkan nilai perusahaan.²⁶

b. Definisi *Corporate Social Responsibility*

Dasar hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Bab IV Pasal 66 dijelaskan bahwa laporan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan harus dicantumkan dalam laporan tahunan atau annual report yang nantinya akan dipublikasikan. Sedangkan pada Bab V Pasal 74, menerangkan apa saja yang mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sudah dijelaskan pada bab dan pasal tersebut.²⁷

Bab V Pasal 74 di dalamnya terdapat 4 ayat yang menerangkan mengenai dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan. Berikut isi penjelasannya:

- (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran

²⁶ Reny Dyah Retno dan Denies Priantinah, “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)”: 87.

²⁷ Undang-undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”²⁸

Definisi CSR menurut *The World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) dalam buku Achmad Lamo Said merupakan suatu tanggungjawab perusahaan demi menjalankan etika bertindak dan berkontribusi terhadap kelanjutan pembangunan ekonomi. Tanggungjawab lain yaitu menaikkan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Jika terdapat tanggungjawab yang penuh oleh manajemen puncak perusahaan mengenai implementasi dari diterapkannya CSR sebagai akuntabilitas publik, maka keselarasan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai dengan harmonis.²⁹

Pernyataan dari *The Commission for European Communities* (CEC) dalam buku Saipullah dan Devy, bahwa perusahaan yang berkomitmen secara sosial bukanlah semata-mata yang memenuhi tanggungjawabnya menurut hukum, melainkan perusahaan yang melaksanakan investasi yang tinggi di bidang *human capital*, lingkungan hidup serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan tidak hanya kepada karyawannya saja, namun juga terhadap masyarakat

²⁸ Undang-undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V pasal 74.

²⁹ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 24.

³⁰ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSr: Sejarah, Pengertian dan Praksis* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 37.

sekitar serta lingkungan tempat perusahaan beroperasi terkait penerapan tanggungjawab sosial perusahaan agar keberlangsungan perusahaan dapat terjaga dan meningkatkan citra perusahaan serta nilai perusahaan.

c. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Adapun prinsip-prinsip dari *Corporate Sosial Responsibility* sebagai berikut:

- 1) Prinsip Akuntabilitas, usaha perusahaan dalam menjalankan aktivitas yang telah dilakukan dengan terbuka dan bertanggungjawab.
- 2) Prinsip *Sustainability*, berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
- 3) Prinsip Transparansi, prinsip keterbukaan informasi bagi pihak eksternal mengenai aktivitas tanggungjawab sosial yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga mengurangi kesalahpahaman khususnya informasi mengenai pertanggungjawaban dampak dari lingkungan.³¹
- 4) Prinsip berperilaku etis berlandaskan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas
- 5) Prinsip menghormati kepentingan dari *stakeholder*, yang dimaksud adalah harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan dari *stakeholder*
- 6) Prinsip penghormatan terhadap adanya supremasi hukum, karena hal tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan
- 7) Prinsip penghormatan terhadap norma-norma perilaku internasional
- 8) Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu perusahaan sebagai suatu entitas harus menghargai hak asasi manusia serta

³¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 50-61.

mengakui akan *urgensi* keuniversalan masing-masing.³²

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Adapun manfaat dari penerapan CSR adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dan para pemuka masyarakat
- 2) Hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dan pemerintah
- 3) Rasa bangga dalam organisasi dan diantara khalayak sasaran
- 4) Saling pengertian antara khalayak sasaran, baik dalam maupun luar
- 5) Menumbuhkan rasa kelayalitan para staf perusahaan
- 6) Meningkatkan citra perusahaan di masyarakat.³³

e. Bidang *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan dalam melaksanakan CSR, terdapat beberapa bidang yang menjadi pertanggungjawabannya terutama pada bidang sosial, yakni lingkungan, pelanggan, karyawan, investor dan masyarakat. Berikut penjelasan dari masing-masing bidang:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap lingkungan
Perusahaan dalam hal ini, harus ramah lingkungan yang berarti limbah hasil operasi perusahaan harus diperhatikan bahwa tidak mencemari lingkungan, serta perusahaan harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya dengan mengolah limbah hasil operasi terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan tempat perusahaan beroperasi sehingga lingkungan tersebut tetap terjaga

³² Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: ALABETA, 2014), 164.

³³ Novi Nur Indah Sari, dkk, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra (Survei pada Masyarakat yang Bekerja di Pabrik Gula Kebon Agung yang Bertempat Tinggal di Daerah Kebon Agung Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, No. 2, (2014): 4-5.

kelestariannya. Masih banyak perusahaan yang belum memenuhi regulasi dari pemerintah mengenai hal ini, namun sudah banyak pula yang menaatinya.

- 2) Pertanggungjawaban terhadap karyawan
Perekrutan, pengangkatan, pelatihan, promosi dan kompensasi adalah kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia yang semua hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap karyawannya. Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap para karyawannya berdasarkan undang-undang. Menurut Zimmerer dalam bukunya Pandji Anoraga, bahwa pertanggungjawaban perusahaan pada karyawan bisa dilakukan seperti berikut: menghormati pendapat karyawan, memberikan *feedback* atau umpan balik bersifat positif maupun negatif kepada karyawan, memberikan apresiasi kepada karyawan yang bekerja dengan baik, dan selalu mempercayai para karyawan.
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pelanggan
Pentingnya perusahaan melaksanakan tanggungjawab kepada pelanggan untuk tetap mempertahankan pelanggan dan membuat pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Menurut Ronald J. Ebert dalam bukunya Pandji Anoraga bahwa tanggungjawab sosial perusahaan terhadap pelanggan, sebagai berikut: perusahaan senantiasa menyediakan barang serta jasa dengan kualitas yang baik dan perusahaan senantiasa mempertimbangkan harga akan produk maupun jasa dengan wajar dan adil. Menurut Zimmerer dalam bukunya Pandji Anoraga, pelanggan juga mempunyai hak yaitu hak keamanan, hak untuk tahu, hak untuk didengarkan, hak mengenai pendidikan

- (pendidikan dalam hak menjaga dan merawat produk) dan hak untuk memilih.³⁴
- 4) Pertanggungjawaban terhadap investor
Perusahaan memberikan *return* atau pengembalian investasi yang menarik dengan dimaksimalkan labanya merupakan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap investor atau pemegang saham. Selain itu, investor juga harus menerima haknya dengan mendapatkan informasi keuangan maupun non keuangan yang jelas dan akurat dari perusahaan.
 - 5) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat
Tanggungjawab terhadap masyarakat bisa dilakukan perusahaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan masyarakat sekitar dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.³⁵

f. Arti Penting *Corporate Social Responsibility*

Banyak faktor yang menyebabkan tanggungjawab sosial perusahaan menjadi penting, sebagai berikut:³⁶

- 1) Hilangnya garis pembatas antar berbagai wilayah di dunia menggambarkan karena adanya arus globalisasi sehingga menjadikan adanya keuniversalan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai banyak cabang di berbagai negara atau bisa disebut multinasional bisa berkembang menjadi mata rantai globalisasi di mana saja

³⁴ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 128-129.

³⁵ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, 130.

³⁶ T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia", *JURNAL Aplikasi Bisnis* 2, No. 2, (2012): 53.

- 2) Memberikan gambaran terkait tanggungjawab perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan yang dibutuhkan oleh pelangganserta investor sebagai *public* primer organisasi profit
- 3) Dibutuhkan tanggungjawab perusahaan, yang merupakan sebagai bagian dalam etika berorganisasi sehingga dapat mengelola perusahaannya dengan baik
- 4) Ketika suatu perusahaan peduli dengan lingkungan dan masalah sosial yang ada, maka masyarakat beranggapan bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi standard etika dalam berorganisasi
- 5) Dengan adanya *corporate social responsibility* dapat mengurangi krisis yang berdampak terhadap organisasi
- 6) Meningkatnya reputasi perusahaan karena telah melaksanakan tanggungjawab sosial.

g. Pengukuran Corporate Social Responsibility

Pengungkapan CSR merupakan pernyataan informasi pada laporan tahunan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. Tingkat pengungkapan tersebut dalam setiap perusahaan, perlu dihitung angka indeks.³⁷

Adapun rumus CSR Index sebagai berikut:³⁸

$$CSRI = \frac{\text{Jumlah teyandiungka}}{\text{Jumlah keseluruhan pengungk}}$$

³⁷ Misharni dan Silmi Aljanah, "Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan dividen dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Indovisi* 1, No. 1, (2018): 120-121.

³⁸ Kiki Syafrinaldi, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013", *Jom FEKON* 2, No. 1, (2015): 8.

5. Nilai Perusahaan

a. Definisi Nilai Perusahaan

Konsep nilai, nilai sering dihubungkan dengan keuntungan atau utilitas ekonomi atas kepemilikan terhadap suatu aset, harga yang akan dibayarkan untuk suatu aset, kemampuan untuk menukar dengan barang atau jasa lainnya. Namun secara sederhananya, nilai dapat disimpulkan sebagai manfaat atau kegunaan dari kepemilikan suatu barang, jasa, atau objek lain yang dapat diukur dengan uang ataupun yang tidak dapat diukur dengan uang.³⁹

Nilai perusahaan menurut Wiagustini dalam buku Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, merupakan tingkat kebersediaan calon pembeli untuk membayarkan sejumlah harga jika perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi kemakmuran yang diperoleh pemilik perusahaan, berarti semakin baik nilai perusahaan. Menurutnya, nilai perusahaan juga merupakan pandangan investor sejauh mana tingkat kesuksesan perusahaan yang biasanya dikaitkan dengan harga saham. Tingginya harga saham mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi pula. Tingginya nilai perusahaan pada suatu perusahaan akan membuat keyakinan pada pasar bahwa kinerja perusahaan baik tidak hanya waktu ini namun juga pada beberapa waktu kemudian.⁴⁰

b. Jenis-jenis Nilai Perusahaan

Sebuah konsep usaha, bahwa nilai perusahaan merupakan nilai yang utuh dan komprehensif. Tapi dibalik itu, terdapat nilai-nilai lain yang menjadi nilai pendukung. Berikut ini beberapa konsep dari nilai yang kemudian menerangkan nilai dari suatu perusahaan:

³⁹ Irwan Djaja, *All About Corporate Valuation* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 5.

⁴⁰ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), 11.

- 1) Nilai Nominal
Nilai nominal adalah nilai yang secara resmi tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, dijelaskan secara jelas dalam neraca perusahaan serta pada surat saham kolektif.
- 2) Nilai Pasar
Nilai pasar biasa disebut kurs merupakan harga yang berasal dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini ditentukan hanya bisa pada pasar saham jika didalamnya ada saham yang dijual.
- 3) Nilai Buku
Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung menggunakan rumus akuntansi. Cara mudahnya yaitu selisih total aset dan total utang, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
- 4) Nilai likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai jual semua aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Menghitung nilai likuidasi bisa menggunakan cara menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performatif yang disiapkan jika suatu saat perusahaan akan dilikuidasi.⁴¹
- 5) Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik merupakan nilai sesungguhnya dari saham yang diperdagangkan. Terdapat dua analisis yang dipakai dalam menemukan nilai sesungguhnya dari suatu saham, yaitu analisis sekuritas fundamental atau analisis perubahan dan analisis teknis. Analisis fundamental memakai data fundamental yakni data dari bagian keuangan perusahaan, misal laba, penjualan dan dividen yang dibayar dan lain sebagainya. Sedangkan analisis teknis yaitu analisis yang memakai data pasar dari saham,

⁴¹ Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia*, 15-16.

misal harga dan volume transaksi saham untuk menemukan nilai dari saham.⁴²

c. Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan bisa dihitung menggunakan Tobin's Q. Analisis Tobin's Q disebut juga rasio Tobin's Q. Rasio ini adalah konsep berharga karena memperlihatkan rancangan pasar keuangan waktu ini mengenai nilai hasil *return* dari setiap dolar investasi di masa yang akan datang. Tobin's Q ditentukan menggunakan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah hutang lalu dibagi dengan total aset perusahaan. Tobin's Q menggambarkan bahwa bukan pada aspek fundamental saja, namun sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang biasanya diperhatikan oleh banyak pihak termasuk investor. Indikator kinerja dari perusahaan akan lebih berarti jika diperhatikan dari nilai rasio setiap tahunnya dengan menggunakan pengukuran rasio Tobin's Q. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan tiap tahun akan diketahui perbandingannya, oleh karena itu investor berharap akan tingginya pertumbuhan dari investasinya.

Tobin's Q yang memiliki nilai < 1 memperlihatkan nilai buku aset dari perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai pasarnya, sehingga perusahaan menjadi sasaran akuisisi yang menarik jika digabung dengan perusahaan lain serta dilikuidasi karena mempunyai nilai saham yang *undervalued*. Jika dipikir lagi, pembeli perusahaan mendapatkan aset dengan harga murah dibandingkan dengan apaabila aset itu dijual kembali. Namun bila Tobin's Q memiliki nilai > 1 berarti nilai buku asetnya lebih kecil dari nilai pasarnya, maka perusahaan mempunyai kemampuan pertumbuhan yang baik sehingga nilai perusahaannya lebih dari

⁴² Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPEE, 2017), 189.

niali aset atau *overvalued*. Adapun rumus dari Tobin's Q yaitu:⁴³

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{MVE} + \text{Debt}}{\text{TA}}$$

Dimana:

MVE = Nilai pasar yaitu diperoleh dari jumlah lembar saham yang beredar dikali (x) harga saham penutupan

Debt = Nilai jumlah kewajiban perusahaan

TA = Nilai jumlah aktiva perusahaan

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Tri dan Ferry (2012), "Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan <i>Food And Bevarage</i> ." ⁴⁴	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2. <i>Good corporate governance</i> tidak dapat memoderasi hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan
2	Laurensia Chintia Dewi	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan manajerial tidak

⁴³ Bhukti Fitri Prasetyorini, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Ilmu Manajemen* 1, No. 1, (2013): 186.

⁴⁴ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan *Food and Beverage*: 118-127.

	dan Yeterina Widi Nugrahanti (2014), "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2011-2013)." ⁴⁵		berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 3. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3	Wardoyo dan Theodora (2013), "Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility</i> Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan." ⁴⁶	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁴⁵ Laurensia Chintia Dewi dan Yeterina Widi Nugrahanti, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2011-2013)": .

⁴⁶ Wardoyo dan Theodora Martina Veronic, "Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility*& Kinerja

			<p>nilai perusahaan</p> <p>4. CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>5. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>6. ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>7. ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p>
4	<p>Luh Eni, Gede Adi, dan Kadek Sinarwati (2014), "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi."⁴⁷</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara positif</p> <p>2. <i>Corporate social responsibility</i> mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan secara positif</p> <p>3. <i>Good corporate governance</i> mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan ke arah negative</p>

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Dinamika Manajemen* 4, No. 2 (2013): 133-149.

⁴⁷ Luh Eni Muliani, dkk, "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

5	Mariatun, Untung dan Edi (2017), "Kinerja Keuangan, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Nilai Perusahaan Dan <i>Good Corporate Governance</i> ." ⁴⁸	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 2. <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3. <i>Good corporate governance</i> tidak dapat memoderasi antara kinerja keuangan dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap nilai perusahaan.
6	Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar (2015), "Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen dan	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen 2. Kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 4. Profitabilitas berpengaruh

dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)", *Jurnal Akuntansi SI* 2, No. 1, (2014).

⁴⁸ Mariatun, dkk, "Kinerja Keuangan, *Corporate Social Responsibility*, Nilai Perusahaan dan *Good Corporate Governance*", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 17, (2017): 119-127.

	Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. ⁴⁹		signifikan terhadap nilai perusahaan 5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 6. Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
7	Ni Putu Wida P. D dan I Wayan Suartana (2014), “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan.” ⁵⁰	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
8	Komang Krisna Wedayanthi dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2016), “Pengaruh	Analisis Regresi Linier Berganda	1. <i>Economic value added</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Komposisi dewan komisaris independen

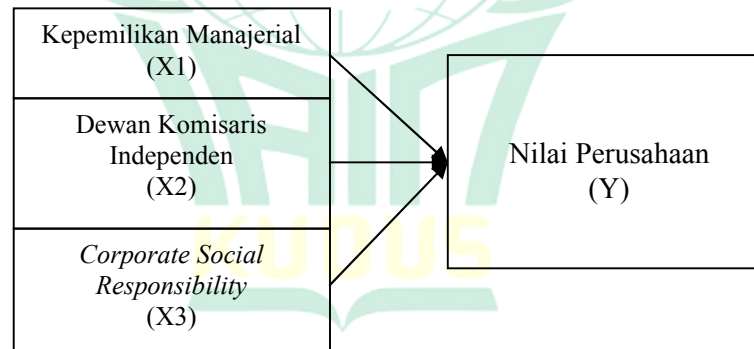
⁴⁹ Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar, “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal EMBA* 3, No. 1, (2015): 1141-1151.

⁵⁰ Ni Putu Wida P. D dan I Wayan Suartana, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9, No. 3, (2014): 575-590.

<p><i>Econoic Value Added</i>, Komposisi Dewan Komisaris Independen, <i>Return On Assets</i> terhadap Nilai Perusahaan.”⁵¹</p>		<p>berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 3. <i>Return on assets</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan</p>
---	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau model penelitian dapat dibuat dengan Kepemilikan Manajerial sebagai X1 dan Komposisi Komisaris Independen sebagai X2 yang merupakan proksi dari *Good Corporate Governance*. *Corporate Social Responsibility* sebagai X3 dan Nilai Perusahaan sebagai Y. Berikut merupakan gambar dari kerangka berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

⁵¹ Komang Krisna Wedyanthi dan Ni Putu Ayu Darmayanti, “Pengaruh *Econoic Value Added*, Komposisi Dewan Komisaris Independen, *Return On Assets* terhadap Nilai Perusahaan”, E-Jurnal Manajemen Unud 5, No. 6, (2016): 3647-3676.

D. Hipotesis

Good Corporate Governance menggambarkan sejauh mana usaha manajemen mengelola perusahaan, itu dapat diperhatikan dari kinerja keuangannya. Diterapkannya GCG pada perusahaan diyakini bisa menaikkan nilai dari perusahaan, karena investor akan berpandangan bahwa perusahaan sudah menjalankan GCG akan meminimalisir adanya keputusan yang hanya menguntungkan pihak manajemen. Semakin baik GCG yang diterapkan pada sebuah perusahaan, sehingga semakin baik pula kinerja operasional perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance* diprosikan dengan Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* cukup kuat karena berperan penting dalam penerapannya dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Kepemilikan manajerial menimbulkan dugaan bahwa dapat menaikkan nilai perusahaan. Jika kepemilikan manajerial dalam perusahaan mengalami peningkatan, hal tersebut akan mendorong manajer agar bekerja secara hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya serta manajer akan melaksanakan kinerjanya secara optimal. Hipotesis tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar yang berjudul “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI” bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Dewan Komisaris Independen merupakan dewan komisaris yang tidak terikat dengan perusahaan dan berasal dari luar perusahaan. Dewan Komisaris Independen menimbulkan dugaan bisa menaikkan nilai perusahaan karena komisaris independen dari pihak luar perusahaan dan tidak mempunyai kepentingan bisnis substansial pada perusahaan. Oleh karena itu komisaris independen dapat mengawasi kinerja manajer perusahaan secara independen dan tidak ada keberpihakan. Serta dewan komisaris independen dapat

memberikan masukan atau saran terkait penerapan GCG dalam perusahaan. Sehingga, kinerja manajer dapat terlaksana secara optimal dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Laurensia Chintia Dewi dan Yeterina Widi Nugrahanti, yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2011-2013)” bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

H2 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap semua elemen penunjang perusahaan yaitu karyawan, pelanggan, masyarakat sekitar serta lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan menimbulkan dugaan bisa menaikkan nilai perusahaan karena jika *Corporate Social Responsibility* dijalankan pada perusahaan akan menciptakan citra perusahaan yang baik di mata masyarakat dan investor. Sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki citra yang baik. Hipotesis tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yustisia Puspaningrum yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)” bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H3 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.